

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Bekasi Tahun 2019 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019. RKPD tahun 2019 memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang berupa stimulan pembangunan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu tahapan dalam rangkaian perencanaan pembangunan daerah, RKPD tidak terlepas dari dokumen dan proses perencanaan di atasnya atau yang mendahuluinya. Dalam hal ini RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan arah dan kebijakan pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun 2019 - 2023 dan Renstra SKPD.

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kota Bekasi periode 20-2019 atau disebut juga sebagai tahun pembangunan infrastruktur ekonomi diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi ditahun pembangunan selanjutnya. Selain itu pada tahun ke dua pembangunan RPJMD periode 2019-2023 diarahkan untuk dapat memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusifitas Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya.

Dimana arah kebijakan umum di tahun 2019 adalah:

- Memperkuat kelembagaan koperasi.
- Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dengan pengelola dana bergulir; Pengembangan dan reorientasi UMKM ke arah industri kreatif;
- Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
- Mengembangkan sentra-sentra perdagangan rakyat;
- Mengembangkan pilot project pasar tradisional modern dan sentra industri kreatif; Memberikan dukungan pendampingan bagi industri kecil yang baru berkembang.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformulasi terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan yang ada untuk menjaga kesesuaian dan

keselarasan arah pembangunan dan untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 tetap mengarah pada visi Kota Bekasi, **KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN** dan Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola yang baik.
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan yang nyaman.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi diatas, bahwa hal ini siring sejalan dengan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagai penyelenggaran kebijakan pemerintah Kota Bekasi dan sebagai upaya pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi misi ketiga yaitu dalam **meningkatkan perekonomian berbasis jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing pada masyarakat**. Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi mendukung penuh atas program prioritas Kota Bekasi tahun 2019-2013 yaitu :

1. Pengembangan **wirausaha industry kreatif berbasis komunitas (program ke 7)**
2. Revitalisasi dan aktivasi **65% kelembagaan koperasi** di Kota Bekasi **(program 8)**
3. Peningkatan **kompetensi dan sertifikasi** bagi pencari kerja dan pelaku UMKM **(program ke 9)**
4. Pembukaan **peluang 150.000 tenaga kerja baru** melalui peningkatan kompetensi, pengembanganusaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja **(program ke 10)**
5. Pembentukan **“Bekasi City Start – Up “** melalui kerjasama **pengembangan incubator bisnis**, untuk melahirkan wirausaha baru **(program ke 11)**
6. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan **“Bekasi City Techno Park” (program ke 14)**

Dengan demikian program prioritas Kota Bekasi menjadi landasan dan acuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menata,memanajemen, serta mengembangkan

sektor Koperasi, UMKM, dan Informal di tengah tengah masyarakat dengan menciptakan program seperti :

- a. Menciptakan koperasi besar yang berfungsi sebagai Distribusi Centre
- b. Menciptakan UMKM yang kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi
- c. Tertatanya kawasan usaha Non Formal
- d. Terciptanya penyerapan tenaga kerja di sector koperasi dan UMKM
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan koperasi sebagai ekonomi rakyat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
10. Undang-undang Nomor 20 tahun tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebagai dokumen perencanaan DiskopUMKM untuk 1 (satu) periode tahun anggaran.2019

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

BAB I	Pendahuluan
	Latar Belakang
	Landasan Hukum
	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Diskop UKM
	Sistematika penulisan Rencana Kerja
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	Analisis kinerja pelayanan perangkat Daerah
	Isu – isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat Daerah.
	Review Rancangan Awal RKPD

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih
2019-2023

Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V

Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pengukuran Kinerja kegiatan terlihat bahwa identifikasi indikator kinerja kegiatan dari *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* telah terdapat:

- a. Input 10 kegiatan;
 - b. Output 10 kegiatan;
 - c. Outcome 10 kegiatan.
1. Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi
 - a. Dana : Rp. 350.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
 2. Penyelenggaraan Bazar Ramadhan
 - a. Dana : Rp. 452.540.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
 3. Bekasi Expo
 - a. Dana : Rp. 690.010.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
 4. Verifikasi Data Koperasi yang Akan Dibubarkan
 - a. Dana : Rp. 75.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
 5. Pendataan Koperasi
 - a. Dana : Rp. 100.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
 6. Intermediasi Koperasi dan UKM dengan keuangan dan lembaga pemasaran
 - a. Dana : Rp. 150.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %

7. Promosi Kuliner kota Bekasi
 - a. Dana : Rp. 500.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
8. Pengadaan gedung UMKM Center
 - a. Dana : Rp. 13.500.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
9. Penataan UMKM Centre
 - a. Dana : Rp. 1000.000.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %
10. Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi
 - a. Dana : Rp. 475.680.000,-
 - b. Waktu : 3 bulan
 - c. Realisasi : 100 %

2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				CATATAN ANALISIS
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	2	3		5	6	5	6	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	-	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT
2	Meningkatnya pertumbuhan koperasi	-	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan Koperasi}}{\text{Jumlah Koperasi aktif}} \times 100$	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT
3	Meningkatnya skala usaha koperasi Kecil, Menengah, Besar.	-	$\frac{\text{Jumlah skala Koperasi}}{\text{Jumlah Koperasi kecil, menengah, besar}} \times 100$	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT	15 UNIT
4	Peningkatan jumlah UMKM Binaan	-	$\frac{\text{Jumlah UMKM}}{\text{Jumlah UMKM binaan}} \times 100$	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	Pembinaan pedagang Informal (PKL) Kota Bekasi	-	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan PKL}}{\text{Jumlah PKL}} \times 100$	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

A. Isu Strategis

1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM
2. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia
3. Meningkatnya pasilitas pembiayaan bagikoperasi, usaha Informal, Mikro kecil dan menengah;
4. Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk UMKM
7. Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk UMKM.

B. Kondisi Existing dan permasalahan terkait Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Jumlah Koperasi aktif 58 %;
2. Kekuatan koperasi masih bersipat farsial;
3. Belum adanya Distribution Centre yang dikelola koperasi;
4. Belum tertatanya zona / kawasan usaha informal yang bersipat rapih
5. Belum maksimalnya daya saing produk UMKM dalam memasuki pasaran;
8. Keterbatasan permodalan KUMKM
9. Belum adanya sarana E-Comerse dalam mendukung pemasaran produk;
10. Belum terkoneksi system monev dan pelaporan KUMKM yang berbasis ICT.

C. Kondisi Pengembangan KUMKM

1. Peningkatan KUMKM
2. Peningkatan akses pasar
3. Peningkatan akses tekhnologi
4. Peningkatan akses kemitraan
5. Peningkatan organisasi dan manajemen
6. Peningkatan permodalan

D. Kebijakan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pengembangan

yang dipilih dengan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Arah kebijakan selama lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif.
2. Penciptaan lapangan kerja melalui pola inti-plasma pada UMKM.
3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan sentra UMKM.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi.
5. Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat.
6. Mengembangkan kemitraan UMKM.
7. Meningkatkan promosi produk daerah.
8. Melindungi konsumen dan pelaku usaha.

E. Potensi pelaku usaha di Kota Bekasi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Koperasi	1112
2	Anggota Koperasi	106124
3	Jumlah UMKM	2163
4	Usaha Informal	472

Peningkatan jumlah koperasi disebabkan oleh beberapa faktor :

- Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan masyarakat
- Tingginya minat/animo masyarakat membangun ekonomi rakyat dalam bentuk badan hukum koperasi

Program/kegiatan penataan badan hukum sebagai jalan baik sehingga peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif, dan pemacuan terhadap peningkatan kualitas koperasi dilaksanakan secara optimal melalui langkah :

- Peningkatan SDM pengelola koperasi
- Peningkatan kemitraan
- Peningkatan permodalan koperasi

- Peningkatan system dan organisasi koperasi
- Peningkatan akses teknologi yang berbasis software
- Peningkatan kerjasama antar koperasi
- Peningkatan sosialisasi perkoperasian bagi tokoh masyarakat dan pemerintah, kelompok kelompok mitra strategis

Keberhasilan Bidang Koperasi dalam mencapai target adalah :

1. Program yang disusun diarahkan untuk pembinaan dalam rangka mewujudkan koperasi tetap eksis berkembang;
2. Program disusun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertarik untuk berkoperasi, sehingga jumlah koperasi bertambah terus
3. Pembinaan yang continue kepada gerakan koperasi
4. Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus bertambah
5. Adanya hubungan yang harmonis dengan dekopinda kota Bekasi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian di Kota Bekasi.

F. Perkembangan UMKM Kota Bekasi

Tahun	Jumlah UMKM
2012	572
2013	637
2014	321
2015	227
2016	285
2017	119

Terjadinya peningkatan jumlah UMKM yang produktif dikarenakan UMKM dan pihak pemerintah mempunyai keterkaitan yang sangat mendukung dalam mencapai UMKM yang produktif dengan cara :

- Pihak UMKM secara kontinu aktif dalam mengikuti informasi informasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri dalam menunjang keikutsertaan UMKM dalam berbagai aktifitas.
- Mendata UMKM secara *continue* baik yang aktif maupun tidak aktif

- Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan nilai produk UMKM
- Melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia para UMKM.
- Mengikutsertakan para UMKM melalui gelar produk dan pameran pameran untuk memperkenalkan produk UMKM.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peringatan HUT Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	15 org, 1 event, 1000 org, 50 kop.	500,000,000	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	15 org, 1 event, 1000 org, 50 kop.	500,000,000	Program ke-8
		Verifikasi Data Koperasi Beku Yang Akan Dibubarkan	Kota Bekasi	Terinventarisasi data koperasi beku yang akan dibubarkan, dalam rangka meningkatkan koperasi aktif	1 keg 1 Database	75,000,000	Kota Bekasi	Terinventarisasi data koperasi beku yang akan dibubarkan, dalam rangka meningkatkan koperasi aktif	1 keg 1 Database	75,000,000	Program ke-8
		Pendataan Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan prosentase koperasi aktif	12 kecamatan	100,000,000	Kota Bekasi	Meningkatkan prosentase koperasi aktif	12 kecamatan	100,000,000	Program ke-8
		Sosialisasi Gerakan Koperasi	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	200 org pengurus/gerakan koperasi	100,000,000	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	200 org pengurus/gerakan koperasi	100,000,000	Program ke-8
		Pelatihan Manajerial Bagi Pengawas Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan SDM bagi pengurus koperasi dengan meningkatkan pemahaman para pengawas koperasi tentang cara mengaudit koperasi	150 org pengawas koperasi	150,000,000	Kota Bekasi	Meningkatkan SDM bagi pengurus koperasi dengan meningkatkan pemahaman para pengawas koperasi tentang cara mengaudit koperasi	150 org pengawas koperasi	150,000,000	Program ke-8

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan	Kota Bekasi	Mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan	100 org pengurus koperasi	100,000,000	Kota Bekasi	Mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan	100 org pengurus koperasi	100,000,000	Program ke-8
		Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir dari Pemerintah	Kota Bekasi	Lap pengembalian dana bergulir dan BPRS kepada koperasi dan UMKM data lap perkembangan keg usaha koperasi dan ukm penerima dana bergulir	1 Laporan	75,000,000	Kota Bekasi	Lap pengembalian dana bergulir dan BPRS kepada koperasi dan UMKM data lap perkembangan keg usaha koperasi dan ukm penerima dana bergulir	1 Laporan	75,000,000	Program Ke-9
		Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatnya prosentase koperasi aktif	75 koperasi 12 kecamatan	200,000,000	Kota Bekasi	Meningkatnya prosentase koperasi aktif	75 koperasi 12 kecamatan	200,000,000	Program ke-8
		Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	Kota Bekasi	Melaksanakan keg manajemen dan tata kelola koperasi	150 org pengurus koperasi	150,000,000	Kota Bekasi	Melaksanakan keg manajemen dan tata kelola koperasi	150 org pengurus koperasi	150,000,000	Program ke-8
		Pengembangan Administrasi Keuangan Koperasi Berbasis ICT	Kota Bekasi	1. Meningkatnya jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT tepat Waktu. 2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif	50% Koperasi melaksanakan RAT	1,500,000,000	Kota Bekasi	1. Meningkatnya jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT tepat Waktu. 2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif	50% Koperasi melaksanakan RAT	1,500,000,000	Program ke-8

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		Sertifikasi Manajer/Pengelola Simpan Pinjam	Kota Bekasi	1. Meningkatnya pemahaman manajer/pengelola koperasi dalam bidang usaha simpan pinjam 2. Meningkatnya akuntabilitas terhadap koperasi	50 orang manajer/pengelola simpan pinjam	500,000,000	Kota Bekasi	1. Meningkatnya pemahaman manajer/pengelola koperasi dalam bidang usaha simpan pinjam 2. Meningkatnya akuntabilitas terhadap koperasi	50 orang manajer/pengelola simpan pinjam	500,000,000	Program ke-8
		Dukungan Perangkat Hardware Pengolahan Data Koperasi	Kota Bekasi	Terwujudnya database koperasi yang up to date/riil time	1 paket	150,000,000	Kota Bekasi	Terwujudnya database koperasi yang up to date/riil time	1 paket	150,000,000	Program ke-8
		Peringatan Hari Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	15 org, 1 event, 1000 org, 50 kop.	300,000,000	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	15 org, 1 event, 1000 org, 50 kop.	300,000,000	Program ke-8
		Pendirian Koperasi di lingkungan RW dan kelompok Masyarakat Strategis	Kota Bekasi	Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi	50 keg 1 Database	150,000,000	Kota Bekasi	Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi	50 keg 1 Database	150,000,000	Program ke-8
		Penyediaan gedung distribusi centre dan kantor Dekopindo Kota Bekasi	Kota Bekasi	Terciptanya gedung sarana Dekopindo Kota Bekasi	1 paket	5,000,000,000	Kota Bekasi	Terciptanya gedung sarana Dekopindo Kota Bekasi	1 paket	5,000,000,000	Program ke-10
		Kemitraan Gerakan Koperasi melalui Peningkatan peran Dekopinda	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	200 org pengurus/gerakan koperasi	100,000,000	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	200 org pengurus/gerakan koperasi	100,000,000	Program ke-11
		Penambahan dana bergulir	Kota Bekasi	Meningkatnya ekonomi keuangan koperasi Kota Bekasi	40 koperasi	10,000,000,000	Kota Bekasi	Meningkatnya ekonomi keuangan koperasi Kota Bekasi	40 koperasi	10,000,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		Penyusunan Perda Peraturan daerah tentang modal penyertaan bagi koperasi di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Terciptanya legalitas formal tentang perkoperasian di Kota Bekasi	1 perda	100,000,000	Kota Bekasi	Terciptanya legalitas formal tentang perkoperasian di Kota Bekasi	1 perda	100,000,000	
2	Progam Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Pendataan PKL di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	12 Kecamatan	300,000,000	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	12 Kecamatan	300,000,000	
		Penataan PKL di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	12 Kecamatan	1,000,000,000	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	12 Kecamatan	1,000,000,000	
		Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang kaki Lima	Kota Bekasi	Terciptanya dan tersosialisasikan pemahaman PKL terhadap perda PKL Kota Bekasi	75 Aparatur, 125 PKL	160,000,000	Kota Bekasi	Terciptanya dan tersosialisasikan pemahaman PKL terhadap perda PKL Kota Bekasi	75 Aparatur, 125 PKL	160,000,000	
		Bimbingan manajemen usaha bagi pelaku PKL	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	100 PKL	100,000,000	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	100 PKL	100,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bekasi Expo	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	UMKM Kota Bekasi	750,000,000	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	UMKM Kota Bekasi	750,000,000	
		Pameran produk unggulan di luar kota bekasi	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	3 Event	600,000,000	Kota Makasar, Kota Manado, Kota Batam	Pameran industri UMKM kreatif	3 Event	600,000,000	
		Penyelenggaraan Bazar Ramadhan	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	UMKM Kota Bekasi	500,000,000	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	UMKM Kota Bekasi	500,000,000	
		Sosialisasi Pemberian sertifikat HALAL bagi UMKM makanan minuman	Kota Bekasi	Sosialisasi, Audit UMKM, Sertifikat	100 UMKM	300,000,000	Kota Bekasi	Sosialisasi, Audit UMKM, Sertifikat	100 UMKM	300,000,000	
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan calon wirausaha melalui ekonomi kreatif	Kota Bekasi	Terbentuknya UMKM kreatif dan punya daya saing di Kota Bekasi	40 UMKM	400,000,000	Kota Bekasi	Terbentuknya UMKM kreatif dan punya daya saing di Kota Bekasi	40 UMKM	400,000,000	
		Peningkatan motivasi kewirausahaan bagi UMKM pemula	Kota Bekasi	Bertambahnya Jumlah UMKM	30 UMKM	300,000,000	Kota Bekasi	Bertambahnya Jumlah UMKM	30 UMKM	300,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	30 UMKM	350,000,000	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	30 UMKM	350,000,000	
		Pengembangan desain batik	Kota Bekasi	Terciptanya batik bekasi yang berdaya saing	50 UMKM	150,000,000	Kota Bekasi	Terciptanya batik bekasi yang berdaya saing	50 UMKM	150,000,000	
		Kegiatan monitoring dan evaluasi UMKM	Kota Bekasi	Terbentuknya tata kelola administrasi UMKM Kota Bekasi	UMKM Kota Bekasi	350,000,000	Kota Bekasi	Terbentuknya tata kelola administrasi UMKM Kota Bekasi	UMKM Kota Bekasi	350,000,000	
		Peningkatan desain & mutu packaging produk UMKM	Kota Bekasi	Terciptanya design packging yang berdaya saing	40 UMKM	300,000,000	Kota Bekasi, Kota Subang	Terciptanya design packging yang berdaya saing	40 UMKM	300,000,000	
		Pelatihan Model Marketing Berbasis ICT Untuk Pengusaha Muda	Kota Bekasi	Bertambah jumlah UMKM yang memasarkan melalui IT	100 UMKM	200,000,000	Kota Bekasi	Bertambah jumlah UMKM yang memasarkan melalui IT	100 UMKM	200,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi UMKM	Kota Bekasi	Terpantau nya jumlah dan kondisi UMKM binaan saat ini dan bertambahnya jumlah UMKM baru di Kota Bekasi	1 Laporan	100,000,000	Kota Bekasi	Terpantau nya jumlah dan kondisi UMKM binaan saat ini dan bertambahnya jumlah UMKM baru di Kota Bekasi	1 Laporan	100,000,000	

		Pelatihan Desain Batik	Kota Bekasi	Meningkatnya SDM pelaku UMKM kerajinan batik	20 UMKM	100,000,000	Kota Bekasi	Meningkatnya SDM pelaku UMKM kerajinan batik	20 UMKM	100,000,000	
		Pelatihan Keterampilan Guna Meningkatkan Produktifitas dan Produk UMKM	Kota Bekasi	Terselenggaranya pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan dan kreatifitas SDM Mamin, Fashion dan Jasa salon ke arah yang lebih maju	50 UMKM Mamin Kota Bekasi, 26 peserta	250,000,000	Kota Bekasi	Terselenggaranya pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan dan kreatifitas SDM Mamin, Fashion dan Jasa salon ke arah yang lebih maju	50 UMKM Mamin Kota Bekasi, 26 peserta	250,000,000	
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pelatihan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM	Kota Bekasi	Pelatihan dan Pemibinaan Wirausaha	300 org	250,000,000	Kota Bekasi	Pelatihan dan Pemibinaan Wirausaha	300 org	250,000,000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tabel. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peringatan HUT Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	500,000,000	
		Verifikasi Data Koperasi Beku Yang Akan Dibubarkan	Kota Bekasi	Terinventarisi data koperasi beku yang akan dibubarkan, dalam rangka meningkatkan koperasi aktif	75,000,000	
		Pendataan Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan prosentase koperasi aktif	100,000,000	
		Sosialisasi Gerakan Koperasi	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	100,000,000	
		Pelatihan Manajerial Bagi Pengawas Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan SDM bagi pengurus koperasi dengan meningkatkan pahaman para pengawas koperasi tentang cara mengaudit koperasi	150,000,000	
		Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan	Kota Bekasi	Mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan	100,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir dari Pemerintah	Kota Bekasi	Lap pengembalian dana bergulir dan BPRS kepada koperasi dan UMKM data lap perkembangan keg usaha koperasi dan ukm penerima dana bergulir	75,000,000	
		Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatnya prosentase koperasi aktif	200,000,000	
		Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	Kota Bekasi	Melaksanakan keg manajemen dan tata kelola koperasi	150,000,000	

		Pengembangan Administrasi Keuangan Koperasi Berbasis ICT	Kota Bekasi	1. Meningkatnya jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT tepat Waktu. 2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif	1,500,000,000	
		Sertifikasi Manajer/Pengelola Simpan Pinjam	Kota Bekasi	1. Meningkatnya pemahaman manajer/pengelola koperasi dalam bidang usaha simpan pinjam 2. Meningkatnya akuntabilitas terhadap koperasi	500,000,000	
		Dukungan Perangkat Hardware Pengolahan Data Koperasi	Kota Bekasi	Tervujudnya database koperasi yang up to date/riil time	150,000,000	
		Peringatan Hari Koperasi	Kota Bekasi	Meningkatkan Koperasi aktif	300,000,000	
		Pendirian Koperasi di lingkungan RW dan kelompok Masyarakat Strategis	Kota Bekasi	Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi	150,000,000	
		Penyediaan gedung distribusi centre dan kantor Dekopindo Kota Bekasi	Kota Bekasi	Terciptanya gedung sarana Dekopindo Kota Bekasi	5,000,000,000	
		Kemitraan Gerakan Koperasi melalui Peningkatan peran Dekopinda	Kota Bekasi	Pertumbuhan koperasi	100,000,000	
		Penambahan dana bergulir	Kota Bekasi	Meningkatnya ekonomi keuangan koperasi Kota Bekasi	10,000,000,000	
		Penyusunan Perda Peraturan daerah tentang modal penyertaan bagi koperasi di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Terciptanya legalitas formal tentang perkoperasian di Kota Bekasi	100,000,000	
2	Progam Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Pendataan PKL di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	300,000,000	
		Penataan PKL di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Monitoring PKL oleh Satgas PKL, Pengawasan Deteksi dini Komindo, penertiban PKL	1,000,000,000	
		Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang kaki Lima	Kota Bekasi	Terciptanya dan tersosialisasikan pemahaman PKL terhadap perda PKL Kota Bekasi	160,000,000	
		Bimbingan manajemen usaha bagi pelaku PKL	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	100,000,000	

3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bekasi Expo	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	750,000,000	
		Pameran produk unggulan di luar kota bekasi	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	600,000,000	
		Penyelenggaraan Bazar Ramadhan	Kota Bekasi	Pameran industri UMKM kreatif	500,000,000	
		Sosialisasi Pemberian sertifikat HALAL bagi UMKM makanan minuman	Kota Bekasi	Sosialisasi, Audit UMKM, Sertifikat	300,000,000	
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan calon wirausaha melalui ekonomi kreatif	Kota Bekasi	Terbentuknya UMKM kreatif dan punya daya saing di Kota Bekasi	400,000,000	
		Peningkatan motivasi kewirausahaan bagi UMKM pemula	Kota Bekasi	Bertambahnya Jumlah UMKM	300,000,000	
		Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pelatihan manajerial keuangan dan tata kelola administrasi	350,000,000	
		Pengembangan desain batik	Kota Bekasi	Terciptanya batik bekasi yang berdaya saing	150,000,000	
		Kegiatan monitoring dan evaluasi UMKM	Kota Bekasi	Terbentuknya tata kelola administrasi UMKM Kota Bekasi	350,000,000	
		Peningkatan desain & mutu packaging produk UMKM	Kota Bekasi	Terciptanya design packging yang berdaya saing	300,000,000	
		Pelatihan Model Marketing Berbasis ICT Untuk Pengusaha Muda	Kota Bekasi	Bertambah jumlah UMKM yang memasarkan melalui IT	200,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi UMKM	Kota Bekasi	Terpantau nya jumlah dan kondisi UMKM binaan saat ini dan bertambahnya jumlah UMKM baru di Kota Bekasi	100,000,000	
		Pelatihan Desain Batik	Kota Bekasi	Meningkatnya SDM pelaku UMKM kerajinan batik	100,000,000	
		Pelatihan Keterampilan Guna Meningkatkan Produktifitas dan Produk UMKM	Kota Bekasi	Terselenggaranya pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan dan kreatifitas SDM Mamin, Fashion dan Jasa salon ke arah yang lebih maju	250,000,000	
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pelatihan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM	Kota Bekasi	Pelatihan dan Pemibinaan Wirausaha	250,000,000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI diuraikan bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Prioritas Nasional Tahun 2014 yang telah tersirat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi
12. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13. Bidang Perekonomian
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang.

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, Dians Koperasi dan UKM Kota Bekasi telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi diuraikan bahwa pencapaian kondisi perdagangan Indonesia yang diharapkan di masa mendatang adalah peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini dapat terjadi dengan terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan, terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar, terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar, terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal, dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka kebijakan perdagangan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan adalah meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor, sedangkan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik, sehingga arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional;

2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antar daerah,
4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa,
5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

3.2 Telaahan Visi Misi Dan Program Prioritas Kepala Daerah Terilih 2019-2023

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat yang kreatif dengan menitikberatkan pada peningkatan daya serap kepada tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar keseimbangan terjadi maka komitmen pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada keberpihakan kepada rakyat dalam bentuk penciptaan iklim usaha yang kondusif, kreatif dan berdaya saing tinggi dengan membuka peluang usaha bagi UMKM dan keberpihakan terhadap masyarakat \kota \bekasi dan DISKOP UMKM agar mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi, **KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN** dalam rangka melaksanakan misi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan program pembangunan berupa :

1. Pengembangan **wirausaha industry kreatif berbasis komunitas** (*program ke 7*)
2. Revitalisasi dan aktivasi **65% kelembagaan koperasi** di Kota Bekasi (*program 8*)
3. Peningkatan **kompetensi dan sertifikasi** bagi pencari kerja dan pelaku UMKM (*program ke 9*)
4. Pembukaan **peluang 150.000 tenaga kerja baru** melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja (*program ke 10*)
5. Pembentukan **“Bekasi City Start – Up “** melalui kerjasama **pengembangan incubator bisnis**, untuk melahirkan wirausaha baru (*program ke 11*)
6. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan **“Bekasi City Techno Park”** (*program ke 14*)

Program tersebut diatas diambil dari 45 program prioritas Kepala daerah terpilih 2019-2023 Pemerintah Kota Bekasi.

3.3. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun implementasi dari Misi Dinas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah menetapkan tujuan yaitu :

Pengembangan sektor industri kreatif;

1. Pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan pelaku usaha;
2. Peningkatan pelayanan prima yang cepat tepat dan akurat;
3. Peningkatan produktivitas dan kemampuan SDM UMKM;
4. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk DISKOP UMKM;
5. Penumbuhan wirausaha baru yang inovatif.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara usaha nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai aturan APBD. Dari sasaran sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengukur kinerja organisasi, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan DISKOP UMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif & memiliki daya saing;
2. Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan pelaku usaha;
3. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur;
4. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk DISKOP UMKM;
5. Meningkatnya kemitraan DISKOP UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha melalui peningkatan jumlah kemitraan usaha;
6. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif;
7. Terciptanya tertib ukur, tertib hukum, dan tertib niaga bagi konsumen dan pelaku usaha

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	NO.	KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya	2	UNIT	1	Kemitraan Gerakan Koperasi melalui Peningkatan Peran Dekopinda	100,000,000	Jumlah MoU antara Pemerintah Daerah dengan Dekopinda dan Jumlah pengurus Koperasi yang terlibat kegiatan Dekopinda	1 MoU, 100 Pengurus Koperasi
				Program Pengembangan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM Kreatif	10	%	1	Bazar Ramadhan	350,000,000	Jumlah Bazar Ramadhan di Tiga Kecamatan	3 Event
								2	Pameran Produk Unggulan	400,000,000	Jumlah Promosi Produk di Tingkat Nasional	3 Event

								3	Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi	200,000,000	Jumlah Pameran yang diikuti UMKM	2 Kegiatan
								4	Pelatihan Pengemasan Produk UMKM	100,000,000	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengemasan produk	50 UMKM
								5	Penataan PKL	150,000,000	Jumlah Lokasi Penataan	1 Lokasi
								6	Pendataan PKL Kota Bekasi	150,000,000	Jumlah PKL yang masuk Database	613 Orang
								7	Sosialisasi Perda dan Perwal tentang PKL	100,000,000	Jumlah PKL yang mendapatkan sosialisasi perda dan perwal tentang PKL	613 Orang

								8	Sosialisasi HAKI dan Sertifikat Halal	200,000,000	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal	50 UMKM
								9	Pelatihan Keterampilan Bagi UMKM	200,000,000	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Keterampilan	60 UMKM
				Program Penjaminan Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	2	%	1	Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi	200,000,000	Jumlah Koperasi dan Tokoh Koperasi yang berprestasi	28 Koperasi dan 3 Tokoh Koperasi Berprestasi
								2	Dukungan Perangkat Hardware Pengolah Data Koperasi	150,000,000	Jumlah Perangkat Komputer	17 PC
								3	Verifikasi Data Koperasi Beku yang Akan Dibubarkan	75,000,000	Jumlah Koperasi terverifikasi	100 Koperasi

								4	Peringatan HUT Koperasi	325,000,000	Jumlah Peserta Yang mengikuti HUT Koperasi	1500 Orang
								5	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir/Penyelesaian Piutang Macet	75,000,000	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi yang tersusun	2 Laporan
								6	Pendirian Koperasi di Lingkungan RW Strategis termasuk Koperasi Masjid Berbasis Syariah	100,000,000	Jumlah Koperasi yang didirikan di lingkungan RW Strategis termasuk Koperasi Masjid yang Berbasis Syariah	28 Koperasi
								7	Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	300,000,000	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan manajemen dan tata kelola usaha koperasi	300 Peserta
								JUMLAH			3,175,000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2019 adalah dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan rencana Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2019 – 2023, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini merupakan pula keberhasilan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karenanya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan sebagai pengikat sinergi bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan dijadikan landasan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hal diatas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan Rencana kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang.
2. Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2019.
3. Melakukan pengelompokan indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan urusan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan.
4. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 guna menjaga kesesuaian administrasi penganggaran dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.
5. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai Desember 2019.

**Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi**



KARTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP 19670415 198603 1 005

